

ABSTRAK

Dendi Priyadi Pratama, 1228010050, 2026, “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat”.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, pelaksanaannya di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat masih menghadapi berbagai kendala, seperti pegawai yang belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi, penanganan error sistem yang memerlukan waktu lama, serta kesiapan sumber daya manusia yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIPD belum berjalan secara maksimal sesuai tujuan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan implementasi kebijakan SIPD berdasarkan faktor komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan sistem tersebut.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan SIPD di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Proposisi penelitian ini menyatakan bahwa implementasi SIPD akan berjalan baik apabila keempat faktor tersebut diterapkan secara optimal dan saling mendukung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan triangulasi data. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling* agar memperoleh data yang mendalam dan relevan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah berjalan cukup baik, dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi, seperti gangguan jaringan, *internal server error*, perubahan sistem yang memerlukan penyesuaian, serta belum adanya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek teknis komunikasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SIPD, Sekretariat DPRD.